

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penarikan diri oleh AS dari Paris Agreement¹ cukup mengejutkan negara dunia dan tentu memberi dampak yang cukup besar terhadap misi kesepakatan ini mengingat AS merupakan negara penghasil emisi karbondioksida terbesar kedua di dunia setelah China yaitu sekitar 5,82 miliar ton emisi CO₂ per tahun (Statista, 2017). AS menjadi salah satu negara yang ikut dalam kesepakatan mengenai pengurangan emisi karbondioksida ini, bahkan menjadi negara paling awal ketika meratifikasi Paris Agreement (Philips, 2016). Saat AS memutuskan untuk bergabung dengan Paris Agreement negara ini berada di bawah kepemimpinan Barrack Obama. Namun ketika kepemimpinan itu berpindah, pada tahun 2017 AS oleh pemimpinnya saat itu, Donald Trump memilih untuk menarik diri dari kesepakatan yang sudah diikuti sejak 2015. *“In order to fulfil my solemn duty to the United States and its citizens, the US will withdraw from the Paris climate accord,..”* (The Guardian, 2017)

Alasan Trump untuk keluar dari kesepakatan ini masih diragukan hingga saat ini. Trump menyatakan bahwa semua ini untuk kepentingan warga AS dan untuk menghindari kerugian bagi negaranya. Hal tersebut dinyatakan oleh Trump sendiri

¹ Paris Agreement merupakan kesepakatan internasional tentang perubahan iklim. Tujuannya untuk mengurangi emisi gas karbondioksida (efek rumah kaca) di dunia setelah tahun 2020.

pada saat berpidato Kamis, 1 Juni 2017 bahwa Paris Agreement merupakan kesepakatan yang buruk (*bad deal*) bagi AS, dan keikutsertaan AS dalam kesepakatan ini berdampak terhadap daya saing ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Trump juga mengutip hasil kajian NERA Consulting yang mengatakan Amerika dirugikan US\$3 triliun dalam beberapa dekade mendatang, dan kehilangan 6,5 juta kesempatan kerja. (CBS News, 2017)

Namun, keputusan Trump ini bertentangan dengan suara mayoritas warga AS yang justru lebih mendukung negaranya tetap mengikuti Paris Agreement. Hal tersebut didukung oleh hasil survei sampel nasional secara acak yang dilakukan oleh *Harvard School of Public Health and Politico* pada April 2017 lalu, sekitar 62 persen warga AS menghendaki tetap ikut dalam Paris Agreement (C2ES, 2017). Selain itu, sejumlah kelompok bisnis di AS seperti Apple, Google, Microsoft, Morgan Stanley, HP secara tegas juga mendukung AS tetap di Paris Agreement karena merasa dengan begitu akan meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, pasar dan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi risiko bisnis. Bahkan paska penarikan diri oleh Trump, beberapa CEO perusahaan besar Amerika seperti Tesla, Disney juga menyatakan penolakan mereka atas keputusan tersebut (Horowitz, 2017). Setelah mengeluarkan keputusan tersebut, Trump dalam pidatonya mengatakan akan bergabung dalam konvensi-konvensi iklim yang lebih baik, “...begin negotiations to re-enter either the Paris accords or a really entirely new transaction, on terms that are fair to the United States.” (The Guardian, 2017)

Jika dicermati, alasan ini kurang dapat diterima secara logis. Pertama, penarikan diri AS dari Paris Agreement tidak akan mengembalikan lapangan kerja mereka yang sempat hilang. Kedua, tidak ada bukti bahwa perjanjian itu tidak adil kepada AS. Setiap negara memiliki target sendiri. Bahkan AS pada masa pemerintahan Barrack Obama memiliki target pengurangan sebesar 26-28% emisi karbon pada tahun 2025. Ketiga, Presiden AS mengeluh akan kesepakatan dalam Paris Agreement mengenai dana yang harus dibayarkan setiap negara untuk Green Climate Fund. Negara-negara maju menjanjikan US\$10 milyar, sementara AS hanya bersedia membayar US\$3 milyar dan baru dibayarkan hanya US\$1 milyar, dimana hal itu berada di bawah kontribusi Korea Selatan (Robinson, 2017).

Permasalahan mengenai keluarnya AS dari Paris Agreement merupakan isu yang cukup baru, sehingga belum ada tulisan ilmiah yang membahas isu ini secara spesifik. Adapun artikel-artikel yang beredar kebanyakan lebih membahas isu ini secara umum. Tumiwa (2017) dalam tulisannya lebih memfokuskan pada implikasi keluarnya AS dari Paris Agreement terhadap agenda perubahan iklim global. Artikel lainnya juga hanya mengulas mengenai alasan AS keluar dari perjanjian ini yang Trump jelaskan bahwa perjanjian ini tidak baik untuk AS (Harbin, 2017). Penelitian ini berupaya untuk melengkapi pembahasan mengenai kasus ini dengan menganalisis kebijakan AS keluar dari Paris Agreement menggunakan teori emosi. Tulisan ini akan memperkaya sudut pandang pembaca dalam melihat faktor yang mempengaruhi keputusan AS yang memilih keluar dari Paris Agreement.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka timbul sebuah pertanyaan yakni, “Mengapa AS di bawah Donald Trump mengambil kebijakan untuk keluar dari Paris Agreement.”?

1.3 Kerangka Teori

Dalam menganalisis permasalahan ini penulis menggunakan teori emosional sebagai pisau analisis. Dalam hubungan internasional, individu atau pemimpin memiliki peran yang signifikan karena menjadi salah satu bagian dari pembuat keputusan atau kebijakan yang mempengaruhi kebijakan negaranya. Marijke Breuning dalam tulisannya memaparkan beberapa penjelasan mengenai perangkat level analisis individu. Ia menyatakan bahwa level analisis individu merupakan proses analisa kebijakan luar negeri yang dilandaskan atas dasar karakteristik pemimpin atau individu pemegang kekuasaan dalam perumusan dan penetapan kebijakan dalam suatu negara (Breuning, 2007). Breuning (2007) menjelaskan bahwa terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam menganalisa kebijakan luar negeri dalam level analisis individu. Pendekatan pertama adalah *operational code*, yang mana pendekatan ini menganalisis perilaku individu berdasarkan psikoanalisis. Pendekatan ini menyediakan pengertian terhadap apa yang ada di dalam pikiran pemimpin sebagai pembuat kebijakan, seperti persepsi, evaluasi, dan juga perhitungan mengenai untung atau rugi terhadap kebijakan yang diambil (Breuning, 2007:38-39). Pendekatan yang kedua ialah analisa karakter presiden. Pendekatan ini berisi pertanyaan mengenai seberapa aktif

atau seberapa pasif pemimpin tersebut (Breuning, 2007:39). Pendekatan ketiga adalah *leadership trait analysis*, pendekatan ini menganalisa kemampuan individu dalam kehidupan politik negaranya, seperti halnya dalam menangani isu-isu politik luar negeri. Pendekatan ini berfokus pada kehidupan politik pemimpin yang tertuang dalam sisi kualitatif dan interpretasi dalam pidato maupun tulisan (Breuning, 2007:44).

Berbeda dengan Breuning, Neack (2008) menjelaskan bahwa setidaknya terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisa kebijakan luar negeri dalam level analisis, yang mana dikategorikan ke dalam *Poliheuristic theory*. *Poliheuristic theory* ini tidak hanya dapat digunakan sebagai pendekatan, namun juga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian suatu masalah. Di dalam *poliheuristic theory* ini terdapat dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan rasionalitas, pendekatan ini melihat perilaku pemimpin dalam kacamata rasionalis. Dalam hal ini, pemimpin dilihat sebagai aktor yang rasional. Pendekatan kedua ialah pendekatan kognitif, yang mana melihat bahwa keputusan yang diambil oleh pemimpin tidak disebabkan semata-mata pengaruh dari pemikiran rasional pemimpin saja, namun juga dipengaruhi oleh psikologis yang membentuk kognitif individu, yang mengakibatkan seorang pemimpin sering mengalami yang disebut *decision conflict* (Neack, 2008:52). Pendekatan kognitif ini hampir sama dengan *operational code* yang dimiliki Breuning, yang mana pendekatan kognitif ini dapat digunakan dalam menjelaskan perilaku individu atau pemimpin, persepsi, dan pembuatan keputusan. Semua pendekatan ini dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai kepribadian

maupun perilaku seorang pemimpin dan kaitannya dengan pembuatan kebijakan, sehingga dapat memudahkan analisis untuk menganalisa kebijakan luar negeri yang diambil. Maka kemudian, analisa pada tingkat individu perlu untuk diangkat sebagai usaha untuk memetakan karakteristik individual pemimpin dengan tujuan untuk lebih memahami dan memprediksi kebijakan luar negeri dari suatu negara (Hudson, 2014). Penelitian ini akan meneliti bagaimana analisa individu Trump dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan selama menjadi pemimpin.

Pengaruh emosi dalam pengambilan keputusan juga merupakan hal yang patut dipertimbangkan dalam menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara. Sama halnya seperti yang terdapat dalam beberapa pendekatan, seperti pendekatan rasional dan kognitif dari Neack, atau *operational code*, analisa karakter, dan *leadership trait analysis* dari Breuning. Analisis pada level individu juga meminjam konsep psikologi, sehingga dapat menjelaskan kepribadian, perilaku, cara membuat keputusan, serta persepsi yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan. Hal ini pula dapat membantu analisis dalam menelusuri, serta mengantisipasi langkah apa yang telah dan akan dilakukan oleh pembuat kebijakan, sehingga menjadi kelebihan tersendiri.

Dampak emosi pada pengambilan keputusan ini sebenarnya tidak sepenuhnya terpisah dari dampak kepribadian. Suasana hati bukanlah suatu konstanta namun dapat berubah di setiap waktu untuk masing-masing individu. Dampak dari suasana hati atau emosi ini pada pengambilan keputusan adalah subjek dari bagian analisis yang akan diteliti. Mc Dermott (dalam Hudson, 2014), menyatakan bahwasanya emosi individu merupakan salah satu faktor yang ikut memainkan peran dalam proses pengambilan

keputusan. Emosi mempengaruhi individu melalui proses pembangunan dalam memotivasi tujuan-tujuan yang akan didapatkan oleh individu, contohnya seperti keinginan untuk memperoleh kekuasaan, afiliasi, kerjasama, atau bahkan intervensi. Sedangkan Breuning (2007) menjelaskan bahwa emosi ini merupakan komponen dari psikologis dan fisik seorang individu. Individu menggambarkan aspek psikologis (atau mental) kepada orang lain sebagai bentuk dari perasaannya, dan ungkapan perasaan ini dapat disertai dengan adanya perubahan fisik. Emosi ini juga sering digambarkan sebagai reaksi spontan. Karena itulah hasil dari emosi kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu yang bernilai kurang masuk akal (Breuning, 2007:47).

Dalam bukunya yang berjudul *Foreign Policy Analysis A Comparative Introduction* Breuning juga mencoba menjelaskan mengenai dampak dari emosi dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin melalui beberapa contoh kasus. Di dalam bukunya tersebut Breuning menemukan bahwa emosi seseorang itu akan mempengaruhi penilaian. Emosi tidak hanya memengaruhi proses pengambilan keputusan tetapi juga penilaian tentang objek perhatian. Meskipun orang-orang dalam budaya yang berbeda mengalami rentang emosi yang sama, masyarakat yang berbeda memiliki norma yang berbeda mengenai ekspresi emosi. Karena itu, mungkin sulit bagi para pembuat keputusan untuk secara akurat menafsirkan emosi rekan-rekan mereka di negara lain — terutama jika norma dan budaya sosial sangat berbeda.

Secara umum, emosi dijelaskan menjadi dua bagian, yaitu emosi negatif dan emosi positif (Muluk, 2012). Emosi negatif diartikan sebagai emosi yang selalu identik dengan perasaan tidak menyenangkan dan dapat mengakibatkan perasaan negatif pada

orang yang mengalaminya. Umumnya, emosi negatif menimbulkan permasalahan yang dapat mengganggu orang yang mengalaminya, bahkan berdampak pada orang lain dan masyarakat secara luas. Kemarahan salah satu emosi negatif yang paling sering ditemukan terkait dengan perilaku politik. Kemarahan dalam hal ini dapat diartikan sebagai adanya kesalahan atas perilaku yang tidak diinginkan, dan mengakibatkan peristiwa yang tidak diinginkan (Muluk, 2012). Selain kemarahan, emosi negatif lainnya juga berpengaruh terhadap seorang pemimpin dalam mengambil sebuah kebijakan, seperti frustrasi, dendam, kehinaan, dan perasaan muak. Daniel Goleman di dalam bukunya menyebutkan beberapa sikap yang merupakan bentuk dari kemarahan, diantaranya yaitu mengamuk, bengis, jengkel, tidak suka, kesal hati dan mengganggu.

Selain emosi negatif, ada emosi positif yang juga penting dalam politik. Emosi positif pada umumnya adalah emosi yang menyenangkan dan mendorong individu untuk mendekati stimulus seperti bahagia, puas, dihargai, dan lain-lain. Selain itu, emosi positif juga berkaitan dengan hal-hal seperti kebanggaan atas pencapaian kelompok atau negara yang dimiliki seseorang, atau kebahagiaan atas sebuah kesempatan untuk mencapai suatu tujuan yang dianggap penting.

Emosi dapat memasuki proses pengambilan keputusan dalam beberapa cara. Pada tingkat yang paling luas, emosi dapat dibagi menjadi dua kategori: integral dan insidental. Emosi integral adalah emosi yang jelas terkait dengan keputusan yang diambil, baik itu prediksi emosi di masa depan atau dipicu oleh emosi pada saat itu. Dengan demikian, emosi integral konsisten dengan kerangka pilihan rasional.

Misalnya, ketika mempertimbangkan tindakan diplomasi, seorang pembuat keputusan mungkin menghitung bagaimana perasaannya jika rekan asingnya nanti mengkhianatinya; pengambil keputusan mungkin kemudian mencoba untuk meminimalkan penyesalan di masa depan dengan memilih tindakan yang kurang berisiko (Lerner, 2012),

Emosi insidental membentuk kategori yang lebih luas. Meskipun secara normatif tidak terkait secara langsung dengan keputusan yang diambil, namun emosi insidental mempengaruhi pengambilan keputusan dengan cara yang kritis. Singkatnya, emosi insidental muncul dari situasi masa lalu atau dari karakteristik kepribadian kronis yang bertentangan dengan emosi integral secara normatif tidak relevan dengan penilaian dan keputusan yang ada (Lerner, 2012). Dalam penelitian ini, konsep emosional serta bagian-bagian yang termasuk dalam emosi akan membantu penulis dalam menganalisis kebijakan Donald Trump terhadap penarikan diri AS dari Paris Agreement. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana emosi Trump secara insidental mempengaruhi kebijakan luar negeri AS.

1.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah bahwa kebijakan luar negeri suatu negara tidak melulu didasarkan pada tindakan rasional. Hal ini didasarkan pada seorang pemimpin yang berperan sebagai pembuat kebijakan yang tidak selalu berpikiran rasional, mengingat manusia tetaplah manusia yang dapat juga dipengaruhi oleh persoalan-

persoalan di kehidupannya yang berpengaruh terhadap kebijakannya. Dalam penelitian ini, keputusan AS keluar dari Paris Agreement dipengaruhi oleh emosi Donald Trump sebagai pembuat kebijakan.

1.5 Metodologi

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka, dimana pengumpulan data melalui arsip pidato, buku biografi Trump, pernyataan pers, unggahan twitter dan jurnal online yang terkait, majalah dan berita yang kredibel, serta artikel-artikel online. Penggunaan media sosial sebagai salah satu sumber data dalam penelitian didasari alasan bahwa semakin melekatnya media sosial dalam jalinan kehidupan, akan semakin sulit untuk mengabaikan potensi yang disajikan untuk penelitian sosial. (Department for Work and Pensions , 2014). Selain itu, studi pustaka juga akan dilakukan dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan politik luar negeri AS.

1.5.2 Tehnik Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan adalah metode analisa isi. Teknik analisis ini biasa digunakan untuk meneliti tentang gaya kepemimpinan, karakteristik personal, motif pembuat keputusan, serta keyakinan pemimpin (Hermann dalam Klotz & Prakash 2008). Menurut Neuendorf (2002), analisa isi menekankan pada pembahasan yang mendalam terhadap informasi yang dapat dijumpai pada media

massa. Dalam artian maka segala bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin baik secara verbal maupun non-verbal akan sangat diperhatikan. Analisa isi berguna untuk mengukur karakteristik personal pemimpin politik seperti kepala negara ketika subjek yang dianalisis tidak bisa diteliti secara langsung untuk diwawancarai (Hermann, 1980). Dengan demikian, hal ini akan membantu penulis dalam menganalisis bagaimana kepribadian Trump melalui komunikasinya, baik itu secara verbal maupun non-verbal.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi ke dalam empat bab utama. Bab 1 adalah pendahuluan yang merupakan desain riset dari penelitian ini. Bab 2 berisi mengenai deskripsi secara detail kebijakan yang ada dalam Paris Agreement serta bagaimana kebijakan AS terhadap Paris Agreement. Bab 3 akan membahas mengenai topik utama dalam penelitian ini yaitu menganalisis emosi Donald Trump sehingga mempengaruhi kebijakan luar negerinya, terkhusus keluarnya AS dari Paris Agreement. Adapun bab 4 merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan serta saran-saran.